



THE HABIBIE CENTER BOOKLET A

Kebijakan Subsidi BBM



Zamroni Salim
Bawono Kumoro
Komaidi Notonegoro

Kebijakan Subsidi BBM

The Habibie Center Booklet A

The Habibie Center

Kebijakan Subsidi BBM dan Pembangunan Energi Berkelanjutan

Project Supervisor:

Rahimah Abdulrahim
(Direktur Eksekutif, The Habibie Center)

Hadi Kuntjara
(Deputi Direktur Operasional, The Habibie Center)

Peneliti:

Zamroni Salim
Bawono Kumoro
Komaidi Notonegoro

Desain dan Publikasi:

M. I. Qeis dan Rahma

Foto :

Zamroni Salim

The Habibie Center mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pembangunan, Energi, dan Perubahan Iklim Kerajaan Denmark dan Global Subsidies Initiative untuk dukungan tulus mereka terhadap proyek ini. Seluruh pandangan di dalam publikasi ini merupakan pandangan The Habibie Center dan tidak mencerminkan pandangan Kementerian Pembangunan, Energi, dan Perubahan Iklim Kerajaan Denmark dan Global Subsidies Initiative.

The Habibie Center Building
Jl. Kemang Selatan No.98, Jakarta 12560, Indonesia
Telp: +62 21 7817211 Fax: +62 21 7817212
e-mail: thc@habibiecenter.or.id
www.habibiecenter.or.id

KEBIJAKAN SUBSIDI BBM

Subsidi BBM Global

Subsidi merupakan salah satu masalah kebijakan publik yang harus diperhatikan dan dikelola dengan baik. Di Indonesia golongan tidak mampu pantas dan harus mendapatkan subsidi sebagaimana Pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 menjamin beberapa aspek dalam kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, apakah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) selama ini diberikan oleh pemerintah telah dinikmati secara keseluruhan oleh mereka berhak menerima? Hal ini menjadi sebuah pertanyaan penting dan mendasar dalam pembahasan mengenai kebijakan subsidi BBM.

Di masa-masa awal subsidi BBM ditujukan untuk meringankan beban golongan tidak mampu dalam memperoleh BBM murah dimana secara tidak langsung juga diharapkan berdampak pada terjangkaunya harga komoditas bahan pokok. Akan tetapi, tujuan baik tersebut dihadapkan pada kenyataan bahwa sebagian besar

golongan tidak mampu justru tidak memperoleh manfaat signifikan dari subsidi BBM. Sebagian besar subsidi BBM tersebut justru dinikmati oleh golongan menengah ke atas.

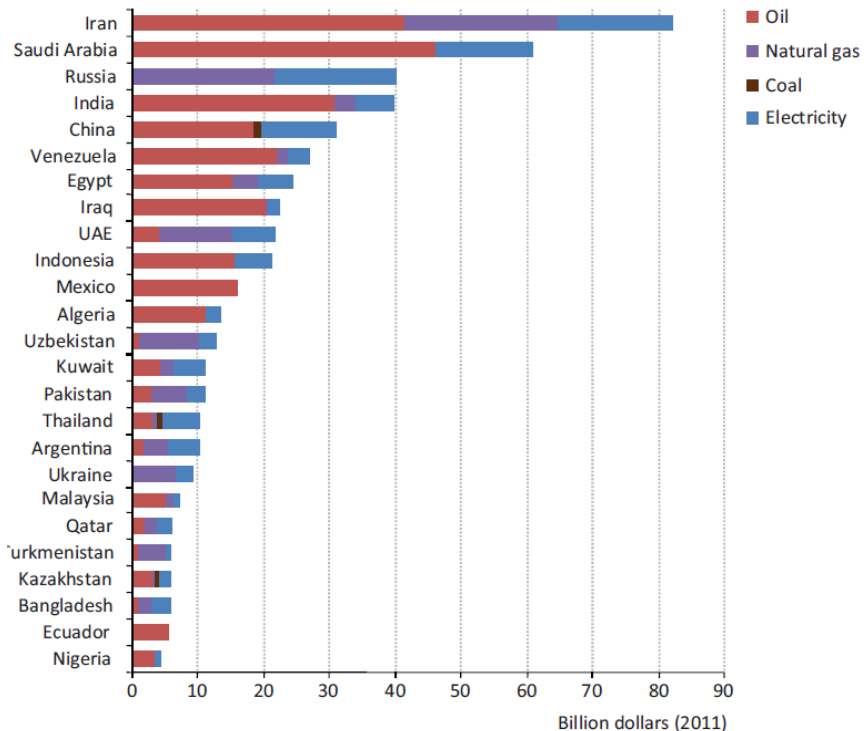
Permasalahan subsidi BBM sangat bervariasi tergantung dari negara bersangkutan. Negara memiliki populasi besar dan bergantung pada sumber energi cenderung menanggung subsidi paling besar. Dari berbagai indikator, Indonesia memiliki nilai subsidi jauh lebih tinggi dari negara-negara lain, terutama bila dikaitkan dengan besar jumlah penduduk. Demikian juga bila dilihat dari potensi defisit anggaran negara, Indonesia menempati ranking atas. Bagaimanakah nilai subsidi BBM di berbagai negara? Tabel di bawah ini memperlihatkan besaran nilai subsidi secara komparatif di berbagai negara.

Berdasarkan grafik nomor 1, Indonesia bukanlah satu-satunya negara memberikan subsidi BBM. Ada negara-negara lain yang juga memberikan subsidi BBM, baik negara berkembang maupun negara maju. Di Amerika Serikat, untuk tahun 2011, pemerintah memberikan sekitar USD 1 miliar potongan pajak BBM untuk petani (MCGrath, 2013). Negara-negara lain seperti Iran (USD 82 miliar), Arab Saudi (USD 61 miliar), Rusia (USD 46 miliar), dan India (USD 43 miliar) juga termasuk dalam kategori negara-negara memberikan subsidi BBM dalam jumlah besar.

Sebagaimana diketahui di Indonesia BBM diperlakukan berbeda dengan komoditas-komoditas lain. Penetapan harga BBM di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh aspek paling mendasar, seperti aspek teknis dan bisnis, tetapi juga mempertimbangkan

sejumlah aspek lain. Beberapa aspek dijadikan pertimbangan dalam menetapkan harga BBM dalam negeri, seperti kondisi fiskal, kemampuan produksi dan konsumsi, target dan arah kebijakan pemerintah, dan daya beli masyarakat. Perkembangan kebijakan harga BBM dari waktu ke waktu secara tidak langsung mencerminkan kondisi sejumlah aspek tersebut.

Grafik 1. Nilai Subsidi untuk Konsumsi Bahan Bakar Fosil 2011



Sumber: International Energy Agency (2012)

Perkembangan Harga BBM Subsidi

Subsidi BBM merupakan salah satu permasalahan penting dan dilematis dalam perekonomian Indonesia. Sejak pemerintahan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) permasalahan subsidi BBM menjadi hal pelik untuk diselesaikan.

Untuk saat ini jenis BBM yang disubsidi oleh pemerintah Indonesia meliputi premium, solar, dan minyak tanah. Subsidi harus diberikan karena harga jual BBM ditetapkan oleh pemerintah lebih rendah dari harga pasar atau biaya pokok pengadaan. Tujuan utama kebijakan subsidi BBM tersebut adalah agar BBM dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Bagaimana dinamika subsidi BBM di Indonesia dari tahun ke tahun? Berikut adalah perkembangan harga BBM bersubsidi berdasarkan rezim pemerintahan.

Rezim Orde Lama (Pemerintahan Presiden Soekarno)

Presiden Soekarno menjabat sejak 18 Agustus 1945-12 Maret 1967. Selama berkuasa Presiden Soekarno beberapa kali menyesuaikan harga BBM bersubsidi. Dari sejumlah data dan informasi berhasil dihimpun penyesuaian harga BBM di masa pemerintahan Presiden Soekarno dilakukan pada 1965 dan 1966. Perkembangan harga BBM bersubsidi di masa pemerintahan Presiden Soekarno adalah sebagai berikut:

**Tabel 1: Perkembangan Harga BBM Subsidi
Era Presiden Soekarno**

Terhitung Mulai		Harga BBM (Rp/Liter)		
Tahun	Tanggal	Premium	Minyak Tanah	Solar
1965	22 November	0,30	0,20	0,20
1966	3 Januari	1,00	0,60	0,80
1966	27 Januari	0,50	0,30	0,40

Sumber: Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero)

Rezim Orde Baru (Pemerintahan Presiden Soeharto)

Presiden Soeharto merupakan pengganti Soekarno yang menjabat sejak 12 Maret 1967-21 Mei 1998. Selama menjabat sekitar 32 tahun tersebut Presiden Soeharto tercatat telah sekitar 21 kali melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Data menunjukkan penyesuaian harga BBM bersubsidi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tidak selalu dilakukan secara serentak untuk semua jenis BBM bersubsidi. Penyesuaian diberlakukan untuk satu jenis, dua jenis, atau tiga jenis BBM subsidi. Perkembangan harga BBM subsidi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto adalah sebagai berikut:

**Tabel 2: Perkembangan Harga BBM Subsidi
Era Presiden Soeharto**

Terhitung Mulai		Harga BBM (Rp/Liter)		
Tahun	Tanggal	Premium	Minyak Tanah	Solar
1967	3 Agustus	4	1,8	3,5
1968	25 April	16	4	12,5
1970	1 Juni	25	10	12,5
1972	1 April	35	10	14
1973	1 April	41	11,5	16
1974	22 April	46	13	19
1975	1 April	57	16	22
1976	1 April	70	18	25
1979	5 April	100	18	35
1979	2 Mei	100	25	35
1980	1 Mei	150	37,5	52,5
1982	4 Januari	240	60	85
1983	7 Januari	320	100	145
1984	12 Januari	350	150	220
1985	1 April	385	165	242
1986	10 Juli	385	165	200
1990	24 Mei	450	190	245
1991	11 Juli	550	220	300
1993	8 Januari	700	280	380
1998	5 Mei	1.200	350	600
1998	16 Mei	1.000	280	550
1998	21 Mei	1.000	280	550

Sumber: Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero)

Rezim Orde Reformasi

Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie

Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie naik ke kursi kekuasaan menggantikan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri akibat tuntutan gerakan reformasi tahun 1998. Presiden BJ Habibie menjabat sejak 21 Mei 1998-20 Oktober 1999. Harga BBM bersubsidi pada pemerintahan Presiden BJ Habibie sama dengan harga terakhir pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam hal ini selama menjabat sebagai presiden, BJ Habibie tidak melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Presiden Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid menjabat sebagai presiden menggantikan Presiden BJ Habibie sejak 20 Oktober 1999-23 Juli 2001. Selama menjabat sekitar dua tahun, Presiden Abdurrahman Wahid tercatat enam kali melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Relatif sama dengan pemerintahan Presiden Soeharto, penyesuaian harga BBM bersubsidi di masa Presiden Abdurrahman Wahid tidak selalu diberlakukan secara bersamaan untuk semua jenis. Perkembangan harga BBM bersubsidi di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid adalah sebagai berikut:

**Tabel 3: Perkembangan Harga BBM Subsidi
Era Presiden Abdurrahman Wahid**

Terhitung Mulai		Harga BBM (Rp/Liter)		
Tahun	Tanggal	Premium	Minyak Tanah	Solar
2000	1 Oktober	1.150	350	600
2001	1 April	1.150	1.080	990
2001	1 Mei	1.150	1.165	1.150
2001	1 Juni	1.150	1.275	1.285
2001	16 Juni	1.450	400	900
2001	1 Juli	1.450	1.289	1.250
2001	23 Juli	1.450	1.289	1.250

Sumber: Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero)

Presiden Megawati Soekarnoputri

Presiden Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai presiden sejak 23 Juli 2001-20 Oktober 2004 menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selama menjabat sekitar tiga tahun tersebut, Presiden Megawati tercatat 18 kali melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Sebagaimana seperti pemerintahan terdahulu penyesuaian harga BBM bersubsidi tidak selalu diberlakukan serentak terhadap semua jenis BBM subsidi. Perkembangan harga BBM subsidi pada masa pemerintahan Presiden Megawati adalah sebagai berikut:

**Tabel 4: Perkembangan Harga BBM Subsidi
Era Presiden Megawati Soekarnoputri**

Terhitung Mulai		Harga BBM (Rp/Liter)		
Tahun	Tanggal	Premium	Minyak Tanah	Solar
2001	1 Agustus	1.450	1.205	1.190
2001	1 September	1.450	970	955
2001	1 Oktober	1.450	1.070	1.000
2001	1 Nopember	1.450	960	945
2001	1 Desember	1.450	895	900
2002	1 Januari	1.450	820	900
2002	17 Januari	1.550	1.230	1.150
2002	1 Maret	1.550	1.270	1.150
2002	1 April	1.600	1.310	1.250
2002	3 Mei	1.750	1.410	1.400
2002	1 Juli	1.750	1.320	1.350
2002	1 Agustus	1.735	1.290	1.325
2002	1 September	1.690	1.390	1.360
2002	1 Oktober	1.750	1.520	1.440
2002	1 Nopember	1.750	1.650	1.550
2002	1 Desember	1.750	1.530	1.550
2003	2 Januari	1.810	1.970	1.890
2003	21 Januari	1.810	1.800	1.650
2004	20 Oktober	1.810	1.800	1.650

Sumber: Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden SBY menjabat sejak 20 Oktober 2004-20 Oktober 2014. Selama menjabat selama 10 tahun tersebut Presiden SBY tercatat melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi sebanyak delapan kali. Perkembangan harga BBM bersubsidi di masa pemerintahan Presiden SBY adalah sebagai berikut:

**Tabel 5: Perkembangan Harga BBM Subsidi
Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono**

Terhitung Mulai		Harga BBM (Rp/Liter)		
Tahun	Tanggal	Premium	Minyak Tanah	Solar
2004	1 Nopember	1.810	1.800	1.650
2005	1 Maret	2.400	2.200	2.100
2005	1 Oktober	4.500	2.000	4.300
2008	24 Mei	6.000	2.500	5.500
2008	1 Desember	5.500	2.500	5.500
2008	15 Desember	5.000	2.500	4.800
2009	15 Januari	4.500	2.500	4.500
2013	22 Juni	6.500	2.500	5.500
2014	20 Oktober	6.500	2.500	5.500

Sumber: Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero)

Postur Anggaran Negara dan Subsidi BBM

Asumsi Makro dalam APBN

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kita lebih cenderung didikte oleh tingkat harga minyak dunia. Mengapa demikian? Hal ini lebih disebabkan bukan lagi karena kita menjadi negara pengekspor, tetapi sebagai negara pengimpor. Setelah diimpor dengan harga internasional, minyak tersebut masih diberikan subsidi oleh pemerintah. Beban subsidi inilah mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap APBN kita.

Bila subsidi BBM ini dikurangi atau dicabut, maka APBN kita lebih alami dan tidak bergantung penuh pada naik turunnya harga minyak dunia. Naik turunnya harga minyak dunia juga akan diikuti oleh naik turunnya harga jual BBM yang tidak disubsidi. Dengan kata lain, APBN Indonesia tetap aman dan tidak terpengaruh secara langsung, meskipun harga minyak dunia bergejolak.

Bagaimana seharusnya subsidi itu diberikan? Berkaca kepada beberapa negara maju yang tetap memberikan subsidi, mereka memberikan subsidi terkait dengan BBM cenderung diberikan bukan pada subsidi BBM bersifat konsumtif, tetapi lebih kepada sektor produktif, seperti kepada petani. Selama ini di beberapa negara seperti Venezuela, Pakistan, dan Indonesia, subsidi yang diberikan untuk BBM berjumlah lebih dari dua kali lipat daripada subsidi yang diberikan untuk sektor kesehatan (McGrath, 2013)

Jumlah alokasi anggaran untuk subsidi BBM saat ini besarnya mencapai 20% dari total nilai APBN. Angka ini sangat besar dan hanya digunakan untuk sektor kurang produktif yang tidak bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih baik. Dalam APBNP tahun 2014, jumlah subsidi secara total adalah sebesar Rp 403 triliun dimana terdiri dari subsidi energi dan non energi. Dari angka tersebut, subsidi energi sebesar Rp 350,3 triliun (subsidi BBM Rp 246,5 triliun dan subsidi listrik Rp 103,8 triliun). Sementara itu, untuk subsidi non energi nilainya jauh lebih kecil sebesar Rp 52,7 triliun. Padahal di dalam subsidi non energi terdapat banyak sektor produktif, seperti kesejahteraan petani, pendidikan, dan kesehatan notabene memiliki dimensi dan tujuan jangka panjang.

Hingga saat ini posisi minyak masih mempengaruhi secara kuat terhadap postur APBN Indonesia, terutama harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Oil Price/ICP*) dan lifting minyak. Indikator ekonomi makro lain juga terkait antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, dan lifting gas. Hal ini terlihat dari asumsi dasar yang dijadikan acuan dalam menghitung besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan anggaran dalam APBN.

**Tabel 6: Selisih Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Realisasi
2008 - 2013**

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013**
Pertumbuhan ekonomi (%)	-0,4	0,3	0,4	0,0	-0,3	-0,5
Inflasi (%)	4,6	-1,7	1,7	-1,9	-2,5	2,3
Suku bunga SBI 3 bulan (%)***	1,8	0,1	0,1	-0,8	-1,8	0,0
Nilai tukar (Rp/USD)	591,0	-92,0	-113,0	79,0	384,0	300,0
ICP (USD/barel)	2,00	0,60	-0,60	16,50	7,70	8,00
Lifting minyak (juta barel per hari)	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-70,0	-60,0
Lifting gas (juta barel per hari)****	-	-	-	-	-	-120,0

Keterangan:

* Angka positif menunjukkan realisasi lebih tinggi daripada asumsinya. Untuk nilai tukar, angka positif menunjukkan depresiasi.

** Merupakan selisih antara APBNP dengan APBN 2013.

*** Sejak APBNP 2011 menggunakan tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

**** Sejak APBN 2013 *lifting* gas menjadi salah satu asumsi dasar ekonomi makro

Sumber: Kementerian Keuangan.

Subsidi BBM

Subsidi, sesuai definisi Kementerian Keuangan, adalah alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan atau lembaga yang memproduksi serta menjual barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jual dapat terjangkau. Anggaran untuk subsidi terdiri dari subsidi energi (untuk BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, LGV, dan subsidi listrik) dan subsidi non energi (subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak).

**Tabel 7: Posisi Subsidi BBM dan Belanja Pemerintah
Menurut Fungsi (triliun rupiah)**

	2013		2014	
	APBN	% BPP	APBN	% BPP
Pelayanan Umum	720,1	62,4	795,5	64,7
Pertahanan	81,8	7,1	83,4	6,8
Ketertiban Kemanan	36,5	3,2	31,9	2,6
Ekonomi	122,9	10,6	117,8	9,6
Lingkungan Hidup	12,4	1,1	11,6	0,9
Perumahan, Fasilitas Umum	30,7	2,7	30,7	2,5
Kesehatan	17,5	1,5	12,2	1,0
Pariwisata	2,5	0,2	2,1	0,2
Agama	4,1	0,4	4,4	0,4
Pendidikan	118,5	10,3	132,8	10,8
P e r l i n d u n g a n Sosial	7,4	0,6	8,1	0,7
TOTAL	1154,4	100	1230,3	100
Subsidi BBM	209		249	

Data di bawah menunjukkan realisasi subsidi BBM hampir selalu lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja modal. Selama kurun waktu tahun 2005-2014, cuma tahun anggaran 2009 saja realisasi belanja modal lebih besar dibandingkan dengan anggaran subsidi BBM. Sedangkan di tahun-tahun lain anggaran realisasi subsidi BBM rata-rata lebih besar dan mencapai 140,20% dari belanja modal.

**Tabel 8: Perbandingan Anggaran Belanja Modal
dan Subsidi BBM**

Tahun	Belanja Modal (Rp triliun)	Subsidi BBM (Rp triliun)	Porsi (%)
2005	32,88	95,59	290,72
2006	54,95	64,21	116,85
2007	64,28	83,79	130,35
2008	72,77	139,10	191,15
2009	75,87	45,03	59,35
2010	80,28	82,35	102,58
2011	117,85	165,16	140,14
2012	145,10	211,87	146,02
2013	180,86	209,99	116,11
2014	229,50	249,49	108,71
Rata-rata	105,43	134,65	140,20

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

*pagu APBN-P 2014

Anggaran subsidi mencapai lebih dari 30% tersebut sebagian besar dialokasikan untuk subsidi BBM. Selama kurun tahun 2005-2014 rata-rata porsi subsidi BBM mencapai 56,35% terhadap total anggaran subsidi. Bahkan, untuk tahun 2005 porsi subsidi BBM mencapai 79,16% terhadap total subsidi pada tahun anggaran tersebut.

Tabel 9: Porsi Subsidi BBM terhadap Total Anggaran Subsidi

Tahun	Total Subsidi (Rp triliun)	Subsidi BBM (Rp triliun)	Porsi (%)
2005	120,76	95,59	79,16
2006	107,43	64,21	59,77
2007	150,21	83,79	55,78
2008	275,29	139,1	50,53
2009	138,08	45,03	32,61
2010	192,70	82,35	42,73
2011	295,35	165,16	55,92
2012	346,42	211,87	61,16
2013	355,04	209,99	59,15
2014*	403,03	246,49	61,16
Rata-rata	238,43	134,358	56,35

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

*pagu APBN-P 2014

Selain subsidi BBM, di APBN juga dianggarkan subsidi untuk listrik. Penjumlahan atau gabungan dari subsidi BBM dan listrik disebut sebagai subsidi energi. Besaran subsidi energi semakin besar karena dalam perkembangannya bukan hanya kebutuhan anggaran subsidi BBM saja meningkat, tetapi juga kebutuhan subsidi listrik. Pada kurun tahun 2005-2014 porsi subsidi BBM rata-rata sebesar 67,18% terhadap total anggaran subsidi energi. Sedangkan porsi subsidi listrik pada kurun waktu tersebut rata-rata sebesar 32,82% dari total anggaran subsidi energi.

Tabel 10: Porsi Subsidi BBM terhadap Total Subsidi Energi

Tahun	Total Subsidi Energi (Rp triliun)	Subsidi BBM (Rp triliun)	Porsi (%)
2005	104,44	95,59	91,53
2006	94,60	64,21	67,88
2007	116,86	83,79	71,70
2008	223,01	139,1	62,37
2009	94,58	45,03	47,61
2010	139,95	82,35	58,84
2011	255,60	165,16	64,62
2012	306,45	211,87	69,14
2013	309,96	209,99	67,75
2014*	350,30	246,49	70,37
Rata-rata	199,57	134,35	67,18

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)- berbagai tahun, diolah
*pagu APBN-P 2014

Nilai subsidi secara umum meningkat dari tahun ke tahun sebesar rata-rata 4,8% atau sekitar Rp72,8 triliun untuk kurun waktu tahun 2008-2013 (Kementerian Keuangan, 2014). Peningkatan ini tidak terlepas dari perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia, parameter subsidi (volume BBM bersubsidi, dan kebijakan terkait kebijakan penyesuaian harga jual eceran BBM dalam negeri dan tarif tenaga listrik) serta perubahan indikator lain.

**Tabel 11: Subsidi BBM, BBN, LPG Tabung 3 Kg dan LGV
2013 - 2014**

No	URAIAN	2013 APBNP	2014 RAPBN
	Subsidi BBM, BBN, LPG Tabung 3 kg dan LGV (miliar Rp)	199.850,0	194.893,1
	- Subsidi BBM dan BBN (miliar Rp)	149.784,4	131.222,9
	- Premium dan BBN	83.484,5	68.814,4
	- Minyak Tanah	6.653,6	6.106,6
	- Minyak Solar dan BBN	59.646,3	56.301,9
	- Subsidi Elpiji Tabung 3 kg (miliar Rp)	31.523,7	36.770,8
	- Subsidi LGV (miliar Rp)	100,0	100,0
	- PPN (miliar Rp)	18.130,8	16.799,4
	- Carry over ke tahun Berikutnya (miliar Rp)	(22.565,4)	-
	- Kek. Subsidi TA 2010 (miliar Rp)	0,03	-
	- Kek. Subsidi TA 2011 (miliar Rp)	4.029,7	-
	- Perk Kek. Subsidi TA 2012 (miliar Rp)	18.846,7	-
	- Perk Kek. Subsidi TA 2013 (miliar Rp)	-	10.000,0
	Parameter :		
1	ICP (US\$/barell)	108,0	106,0
2	Kurs (Rp/US\$)	9.600,0	9.750,0
3	Alpha BBM (Rp/liter)	666,60-715,35	718,4
4	Volume BBM + Bio BBM (ribu KL)	48.000,0	50.500,0
	- Premium dan BBN	30.767,0	32.960,0
	- Minyak tanah	1.200,0	1.100,0
	- Minyak solar dan BBN	16.033,0	16.440,0
5	Volume Elpiji (juta kg)	4.394,2	4.783,0

Sumber: Kementerian Keuangan

The Habibie Center
Jl. Kemang Selatan No.98, Jakarta 12560, Indonesia
Telp: +62 21 7817211 Fax: +62 21 7817212
e-mail: thc@habibiecenter.or.id
www.habibiecenter.or.id